

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN SPP GRATIS BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alpriyansyah Marla

NPP. 29.1360

Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Stud, Studi Kebijakan Publik

Email: Alpriyansyah007@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Provision of Free Educational Contributions to Students in the District is a program carried out by the Pangkep Regency government which is carried out to improve the distribution of learning opportunities in universities, improve the quality of human resources (HR) in developing scientific disciplines, increase the relevance of education so that it can keep up with global developments, and increase the efficiency and effectiveness of education administration to meet global needs. superior quality & productivity of human resources. Purpose:* *The purpose of this research is to find out how the implementation of the policy of providing free tuition fees for students in Pangkep Regency, as well as the factors that cause inhibited in the implementation of the policy of providing free tuition for students in Pangkep Regency. In this study the authors used qualitative research with an inductive approach, with data collection techniques in the form of interviews, observations (observations) and documentation, while data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. Result:* *The results show that in general the implementation of the free tuition fee policy is quite good. Conclusion:* *However, there are also obstacles encountered during the implementation of the policy, namely the process of disbursing funds which is a little late, the delivery of information related to policies must be maximized and the need for additional employees so that the process of implementing the policy can run more smoothly than expected.*

Keywords: *Implementation, Free Tuition Policy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pemberian Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkep merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep yang dilaksanakan untuk Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada Perguruan Tinggi, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada mengembangkan disiplin ilmu, Meningkatkan relevansi pendidikan supaya bisa mengikuti perkembangan global, dan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan buat memenuhi mutu & produktivitas SDM yang unggul. Tujuan:* *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari pelaksanaan kebijakan pemberian SPP gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkep, serta faktor yang menjadi penghambat dalam*

implementasi kebijakan pemberian SPP gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkep **Metode:** Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi (Pengamatan) dan dokumentasi, adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan SPP gratis ini sudah cukup baik. **Kesimpulan:** Akan tetapi ada juga kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu proses pencairan dana yang sedikit terlambat, penyampaian informasi terkait kebijakan harus lebih dimaksimalkan lagi serta perlunya penambahan pegawai agar jalannya proses pelaksanaan kebijakan bisa berjalan lebih lancar dari yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan SPP Gratis

I. PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan, ada unsur politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, iklim, psikologis, sosiologis, etika, estetika dan lain-lain. Dari pelaksanaan proses pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini.

Namun meski pendidikan merupakan hal yang sangatlah penting, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah yang sering terjadi di masyarakat terkait pendidikan adalah biaya pendidikan yang tergolong mahal untuk ditempuh bagi para masyarakat tidak mampu serta adanya tuntutan ekonomi dari keluarga yang mengakibatkan pemikiran sebagian masyarakat untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi tertutupi karena mereka berpikir sebaiknya bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga yang begitu besar.

Di Kabupaten Pangkep sendiri, pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting, pemerintah Kabupaten Pangkep selalu mengedepankan hal-hal yang terkait pendidikan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pangkep sama dengan permasalahan yang terjadi pada umumnya yaitu biaya pendidikan yang tergolong cukup mahal untuk kalangan yang tidak mampu sehingga banyak pemikiran dari masyarakat Pangkep untuk segera bekerja agar tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak.

Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan pemerintah Kabupaten Pangkep yang menginginkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mempercepat pembangunan agar dapat mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Pangkep. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Pangkep mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan agar lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mempercepat pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkep. Selain itu pada kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai fungsi menaruh pelayanan publik yg dibutuhkan masyarakat, mulai dari pelayanan pada bentuk regulasi atau pelayanan lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain, untuk memenuhi aspirasi negara, terutama bagi pemerintah kabupaten Pangkep itu sendiri, demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan hal

tersebut pemerintah Kabupaten Pangkep mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat mewujudkan harapan tersebut yaitu kebijakan pemberian Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) gratis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Yang dimaksud SPP gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkep dalam penelitian ini adalah SPP yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep selama 2 semester untuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dan telah berada semester 3 dan 4 serta tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP dan surat keterangan aktif kuliah dari pihak kampus. Adapun tujuan dilaksanakannya program kebijakan pemberian SPP gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkep ini berdasarkan dari petunjuk teknisnya, yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin ilmu, meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul.

Tabel 1.1

Rekapitulasi mahasiswa berprestasi penerima bantuan SPP gratis

No	Uraian	Jumlah Mahasiswa	Anggaran
1	Angkatan 2020	738 orang	Rp 1.333.275.365
2	Angkatan 2019	770 orang	Rp 1.349.066.250
3	Angkatan 2018	784 orang	Rp 1.321.964.750
4	Angkatan 2017	457 orang	Rp 765.904.500
Jumlah total		2749 orang	Rp 4.770.210.865

Sumber: SK Bupati Pangkep tentang daftar penerima dana bantuan SPP gratis tahun anggaran 2021

Tabel 1.2

Rekapitulasi mahasiswa kurang mampu penerima bantuan SPP gratis

No	Uraian	Jumlah Mahasiswa	Anggaran
1	Angkatan 2020	99 orang	Rp 181.925.000
2	Angkatan 2019	237 orang	Rp 429.741.000
3	Angkatan 2018	202 orang	Rp 350.356.250
4	Angkatan 2017	131 orang	Rp 223.210.000

Jumlah total	669 orang	Rp 1.185.232.250
---------------------	-----------	------------------

Sumber: SK Bupati Pangkep tentang daftar penerima dana bantuan SPP gratis tahun anggaran 2021

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Di Kabupaten Pangkep pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting, pemerintah Kabupaten Pangkep selalu mengedepankan hal-hal yang terkait pendidikan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pangkep sama dengan permasalahan yang terjadi pada umumnya yaitu biaya pendidikan yang tergolong cukup mahal untuk kalangan yang tidak mampu sehingga banyak pemikiran dari masyarakat Pangkep untuk segera bekerja agar tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan pemerintah Kabupaten Pangkep yang menginginkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mempercepat pembangunan agar dapat mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Pangkep. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Pangkep mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan agar lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mempercepat pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkep.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, artikel jurnal penelitian oleh Muhamad Rifa'I tahun 2018 berjudul Beasiswa Bidikmisi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk Mengetahui Implementasi Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana beasiswa.

Kedua, artikel jurnal penelitian oleh Asmirawati tahun 2016 berjudul Pengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui pengaruh pemberian Beasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ketiga, , artikel jurnal penelitian oleh Evan Suyono tahun 2015 yang berjudul Inovasi kebijakan pendidikan di Palopo, tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui gambaran akan level inovasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Palopo dan untuk mengetahui jenis inovasi dari kebijakan tersebut serta untuk mengetahui tipe inovasi dari kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota Palopo.

Keempat, skripsi oleh Maghfira Fitri Maulani yang berjudul Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program penyaluran SPP gratis sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan, pada beberapa factor yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen/badan pelaksana, sikap/kecenderungan para

pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, lingkungan ekonomi, soisal dan politik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Akmal tahun 2016 yang berjudul Implementasi Program Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Dua Semester Di Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi program SPP gratis dua semester bagi mahasiswa baru strata sarjana pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan, masih jauh dari harapan bila dilihat dari empat factor kritis yang ditawarkan oleh Edward III sebagai teori yang digunakan penelitiannya. Bahwa faktor disposisi dan susunan birokrasi sudah berjalan dengan baik walau dengan beberapa kekurangan. Namun, dilihat dari factor komunikasi dan sumber daya belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang relevan ialah, pada penelitian ini penulis juga meninjau pengimplementasian undang-undang yang terkait dengan kemudahan pendidikan yang diberikan salah satunya yaitu pemberian SPP gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar penulis untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya tujuan yang ditetapkan yaitu perbaikan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Kemudian factor penghambat yang menjadi kendala kurang maksimalnya pelaksanaan program ini yaitu eterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang cukup lama diakibatkan susunan birokrasi dan komunikasi yang dianggap masih kurang meski SOP yang diterapkan cenderung muda untuk diterapkan namun, informasi yang sampai kadang kurang jelas.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan juga sekaligus untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

II. METODE

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna dari pada generalisasi, serta teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif, yang dimana penelitian dengan jenis deskriptif berarti data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian yang ditunjuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Kutipan dan data ini didapatkan melalui catatan di lapangan, foto, rekaman, wawancara, dan dokumentasi resmi lainnya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2, yaitu: data primer dan data sekunder, adapun penjelasan/pemaparan. Teknik penetapan informan yang dilakukan oleh penulis adalah teknik purposive sampling. Untuk memperoleh hasil penelitian yang cermat dan valid serta memudahkan penelitian maka perlu menggunakan

alat bantu berupa daftar pertanyaan (Wawancara), pedoman observasi, pensil/pulpen dan catatan penulis yang berfungsi sebagai alat pengumpul data serta alat pemotret sebagai media dari dokumentasi. Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pertanyaan dari hasil wawancara dari para informan. Kegiatan analisis data terdiri dari tiga (3) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus mengatur pola pendidikan dengan sangat baik agar apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia dapat tercapai, seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 12 ayat (1) ditekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diatur oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang mengarah pada pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga ke Perguruan Tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan tentunya akan memperbesar peluang dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan melanjutkan program SPP Gratis di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mahasiswa baru semester satu dan dua, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan kebijakan pemberian dana bantuan SPP Gratis bagi mahasiswa Pangkep semester I dan sampai semester VIII. Jadi dalam penelitian ini, SPP Gratis yang dimaksudkan adalah SPP Gratis selama 8 semester, untuk mahasiswa asal Kabupaten Pangkep yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan.

Kebijakan Pemberian Bantuan SPP Gratis oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Petunjuk teknis tersebut mengacu pada petunjuk teknis yang digunakan pada tingkat provinsi dengan beberapa perubahan. Kebijakan Pemberian Bantuan SPP Gratis ini didasarkan pada beberapa keputusan Bupati Pangkep dalam beberapa periode, yaitu:

- 1) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 116 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Politeknik Pertanian Pangkep dan Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 2) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 204 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 3) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 205 tahun 2015 tentang Bantuan Fasilitas Pendidikan Pemuda Mengikuti Pendidikan pada Universitas Negeri Makassar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 4) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 206 tahun 2015 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan

Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

- 5) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 221 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 6) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 534 tahun 2016 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.
- 7) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 535 tahun 2016 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.
- 8) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 625 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.
- 9) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 626 tahun 2016 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk Semester III dan IV Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.
- 10) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 653 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.

Penyelenggaraan Kebijakan Pemberian Bantuan SPP Gratis bagi mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan ini bermaksud untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga Pangkajene dan Kepulauan agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan dibuatnya Kebijakan Pemberian Bantuan SPP Gratis ini, yaitu:

- 1) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin ilmu;
- 3) Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul. Program Bantuan SPP Gratis ini diselenggarakan sejak tahun 2015 yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2. Jadi setiap mahasiswa berhak mendapat dana bantuan sebanyak 8 kali. Secara total jumlah penerima bantuan memang mengalami peningkatan setiap tahun tahun 2015 sebanyak 921 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 1.097 orang. Adapun sasaran dari Kebijakan ini adalah untuk mahasiswa S1 maupun Diploma semester 1 sampai semester 8.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan Pemberian SPP Gratis dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh George Edward III yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Maka dari itu George Edward III menyebutkan ada 4 Variabel krusial dalam Implementasi, yaitu:

- Komunikasi
- Sumber Daya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi

3.1 Komunikasi

Terkait hal komunikasi implementasi kebijakan SPP gratis ini sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kejelasan pelaksanaan kebijakan kepada para sasaran yang dalam hal ini adalah para mahasiswa Kabupaten Pangkep serta konsistensi pelaksanaan kebijakan SPP gratis ini yang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dari sisi transmisi (Penyampaian) kebijakan ini masih kurang maksimal terutama pada penyampaian melalui media sosial, pemerintah Kabupaten Pangkep harus lebih memaksimalkan lagi penyampaian terkait kebijakan SPP gratis ini agar jalannya proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.

3.2 Sumber Daya

Terkait Sumber Daya, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) sudah sangat baik pemerintah Kabupaten Pangkep memanfaatkan SDM dengan sangat baik hal tersebut terbukti dengan para pelaksana yang semuanya merupakan lulusan S-1 dari bidangnya masing-masing serta ada beberapa dari para pelaksana kebijakan yang lulusan S-2 serta S-3. Sedangkan dari segi Sumber Daya Anggaran (Finansial), sejak diberlakukannya kebijakan SPP gratis ini, dana anggaran yang tersedia tidak pernah mengalami kekurangan, akan tetapi waktu pencairan dana bantuan yang sedikit terhambat karena adanya beberapa masalah, sehingga jalannya proses implementasi sedikit terhambat. Dari Segi Sumber Daya Peralatan, pemerintah Kabupaten Pangkep telah memfasilitasi para pelaksana dengan baik jika melihat dari hasil wawancara dengan para informan yang terkait, untuk fasilitas tidak ada masalah karena fasilitas yang ada sudah sangat memadai untuk pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan dengan lancar.

3.3 Disposisi

Dari segi Disposisi pun sudah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait, para pelaksana kebijakan telah mengetahui dengan baik terkait kebijakan yang akan dilaksanakan serta kemauan yang tinggi dari para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan dan kemampuan para pelaksana yang sudah tidak diragukan lagi karena ada beberapa dari mereka yang telah menjadi pelaksana kebijakan sudah lebih dari 3 tahun

3.4 Struktur Birokrasi

Dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh pelaksana kebijakan tergolong mudah hal tersebut dilakukan agar sasaran dari kebijakan ini dapat dengan mudah mehami kebijakan SPP gratis ini dan tujuan dari kebijakan bisa segera tercapai. Akan tetapi dari struktur organisasi para pelaksana ada sedikit kendala, yaitu adanya kekurangan tenaga kerja di beberapa bidang pada pelaksana kebijakan sehingga hal tersebut sedikit menghambat jalannya proses implementasi kebijakan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kemudahan yang diharapkan di dunia pendidikan. Untuk implementasi kebijakan SPP gratis ini sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kejelasan pelaksanaan kebijakan kepada para sasaran yang dalam hal ini adalah para mahasiswa Kabupaten Pangkep serta konsistensi pelaksanaan kebijakan SPP gratis ini yang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dari sisi transmisi (Penyampaian) kebijakan ini masih kurang maksimal terutama pada penyampaian melalui media sosial, pemerintah Kabupaten Pangkep harus lebih memaksimalkan lagi penyampain terkait kebijakan SPP gratis ini agar jalannya proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara umum implementasi kebijakan pemberian bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ini meskipun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti proses pencairan dana yang sedikit terlambat, penyampaian informasi terkait kebijakan harus lebih dimaksimalkan lagi serta perlunya penambahan pegawai agar jalannya proses pelaksanaan kebijakan bisa berjalan lebih lancar dari yang diharapkan, akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu masalah besar mengingat pemerintah Kabupaten Pangkep telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir masalah yang terjadi agar proses pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar sehingga bisa dikatakan implementasi kebijakan pemberian bantuan SPP gratis ini sudah berjalan dengan cukup baik.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas oleh waktu yang kurang panjang, dan penelusuran informan menjadi lebih sempit. Kemudian wawancara hanya peneliti fokuskan kepada beberapa orang mahasiswa di fakultas yang tidak terkhusus atau menargetkan kelas atau jurusan tertentu, untuk itu masih perlu dilakukan pemetaan informan dan waktu yang lebih longgar.

Arah masa depan penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemangkasan waktu untuk memaksimalkan pemberian SPP gratis yang lebih efektif dan efisien.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada beberapa mahasiswa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (pangkep), Bapak Bakhtiar S,Sos , M.Si selaku bagian kemahasiswaan STKIP (Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bapak H. Amiruddin, S.Pd, M.Pd, Pengelola dan pelaksana dari Program Pemberian Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkep, serta kepada Bapak Dr. Sabrun Jamil, S.Pi, Mp Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

VLDAFTAR PUSTAKA

- Said Zainal Abidin;. (2012). *Kebijakan publik /* . Jakarta : Salemba Humanika
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.*
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.* Penerbit Alfabeta.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3)*, 13-26.
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1)*, 1-11.
- Oktavianti, D. R., & Lituhayu, D. (2017). Implementasi Kebijakan Transportasi Umum di Kota Semarang (Studi kasus Perum Damri). *Journal of Publik Policy and Management Review, 6(3)*, 1-11.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi, 14(1)*, 126-138.
- Sudarwati, T. M. (2012). *Implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup sekolah menengah atas negeri 11 semarang menuju sekolah adiwiyata* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Firdaus, M. R. P. A. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH (Studi Tentang Anak Putus Sekolah Tingkat SMP/MTS di Kota Malang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Ikramullah Akmal, Muhammad , 2016 . Implementasi program Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa baru 2 semester di provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin, Skripsi tidak diterbitkan
- Wahyuni, Riska , 2010. Implementasi kebijakan untuk pendidikan gratis di SDN Percobaan 1 & SMP terbuka 05 Makassar . Universitas Negeri Makassar. Skripsi tidak diterbitkan
- Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Publik Sector Innovations), 2(1)*, 1-9.
- Tisngati, U., Martini, M., & Iriani, S. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DI PKBM BERDASARKAN MODEL GRINDLE. *Jurnal Humaniora, 3(02)*.
- Sudarwati, T. M. (2012). *Implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup sekolah menengah atas negeri 11 semarang menuju sekolah adiwiyata* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan

- operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Publik Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Perdana, N. G., & Widodo, T. (2013). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa Kepada Peserta Didik Baru Menggunakan Metode TOPSIS. *Semantik 2013*, 3(1), 265-272.
- Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2016). Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51-66.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Publik Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Darmawan, D. (2015). Faktor Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Suatu Studi di Kota Pontianak). *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2).
- POSANGI, H. A., LENGKONG, F., & DENGO, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara*, 2(1), 1-19.
- Saputra, P. R., Hermawan, D., & Wulandari, J. (2021). Penerapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Edward Iii & Dessler. *Wacana Publik*, 15(01), 26-33.

